



Analisis Dampak Ekonomi dan Strategi Mengatasi Pengangguran Akibat Covid-19

Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan

UIN Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author : ✉ fadhilahahmad@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The Covid19 outbreak has had an overall effect on all sectors of life, especially the economic sector. This study aims to analyze the impact and strategies in overcoming rising unemployment during the covid19 period. This study uses a qualitative method, namely a literature study, studies obtained from relevant literature and news related to the unemployment rate during the Covid-19 period. The results of this study indicate that the Covid-19 pandemic has had a significant impact on increasing unemployment and strategies for dealing with unemployment are carried out by the government and individuals.

Keywords

Covid 19 Impacts, Unemployment, Economic Strategies



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Persebaran pandemi Covid-19 yang berawal dari Wuhan China memberikan efek global terhadap seluruh sector kehidupan. Selain menjadi bencana kesehatan, pandemic covid-19 juga berefek negatif pada sector Pendidikan, social, dan ekonomi. Hingga November 2021, total kasus konfirmasi COVID-19 secara global adalah 258.164.425 kasus dengan 5.166.192 kematian (CFR 2,0%) di 204 Negara Terjangkit dan 151 Negara Transmisi Komunitas, sedangkan Indonesia telah melaporkan 4.254.443 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan ada 143.766 kematian (CFR: 3,4%) terkait COVID-19 yang dilaporkan dan 4.102.700 pasien telah sembuh dari penyakit tersebut.

Sebagai negara yang telah mengalami krisis moneter beberapa tahun silam, tentu tidak mudah bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk memperbaiki perekonomian Indonesia, Pemerintah menyadari hal tersebut setelah krisis terjadi, mengenai kebijakan yang ada saat ini mengakibatkan kemerosotan serta lemahnya perekonomian nasional, sehingga dalam rancangannya, pemerintah perlu sebuah langkah yang lebih stabil serta terencana, mengingat tantangan perekonomian bangsa semakin rumit (Prasetyo, 2008).

Indonesia tercatat mengalami penurunan ekonomi sebesar 5.32 persen ada kuartal II tahun 2020 dan 3.49 persen pada kuartal III 2020, Indonesia telah resmi

memasuki resesi ekonomi (Uly and Jatmiko, 2020). Dampak pandemic ini jelas telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pekerja yang kehilangan pekerjaan, dan masyarakat yang kehilangan kesempatan untuk membuka usahanya sebagai dampak dari PSBB maupun PPKM.

Kebijakan pembatasan aktivitas dan kegiatan yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan memotong rantai persebaran COVID-19 memberikan dampak ekonomi yang beragam bagi setiap negara. Dampak ekonomi yang terjadi seperti penurunan aktivitas ekonomi, yang kemudian berdampak pada penurunan distribusi produk dan pendapatan serta peningkatan pengangguran. Penurunan yang tajam terhadap hal-hal tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan resesi ekonomi. Kondisi tersebut yang saat ini menjadi perhatian setiap negara dengan membuat serangkaian kebijakan untuk menyikapinya.

COVID-19 menimbulkan kegoncangan secara global dan pada berbagai sektor terkhusus ekonomi. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi juga diiringi dengan jumlah kasus yang terus meningkat dan angka kematian yang tinggi. Untuk dapat menanggulangi permasalahan ini tentu setiap negara telah menyiapkan kebijakan tertentu. Baik kebijakan fiskal maupun moneter semua sudah dipersiapkan, namun memang ada perbedaan antara tiap negara (Barua, 2020).

Peningkatan pengangguran dan penurunan pendapatan menjadi salah satu aspek pemicu terjadinya resesi ekonomi, hal ini bisa terjadi dikarenakan dalam jangka panjang pengangguran dan penurunan pendapatan akan berakibat pada penurunan kesejahteraan yang besar. Dampak besar yang terjadi dari resesi ekonomi yang berkepanjangan akan mengakibatkan penurunan kesehatan mental pada populasi satu negara. (Boyce, Delaney, & Wood, 2018).

Pengangguran merupakan seseorang yang masuk dalam kategori angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Angkatan kerja merupakan seseorang yang sudah pantas untuk mencari pekerjaan dengan rentang usia 15 sampai 65 tahun dan mempunyai keinginan untuk bekerja, hanya saja kondisi yang membuat sulit mendapatkan pekerjaan. Dalam keadaan pandemi covid 19 ini menyebabkan banyak orang sulit mencari pekerjaan dikarenakan banyak orang justru harus kehilangan pekerjaan dan membuat persaingan sesama tenaga kerja menjadi semakin meningkat (Indayani dan Hartono, 2020).

Tidak semua orang mengharapkan ingin menganggur, tentunya setiap orang menginginkan keberlangsungan hidup dengan mendapatkan pekerjaan yang sesuai di era sekarang dimana persaingan kerja yang sangat ketat. Ada beberapa jenis pengangguran, (1) pengangguran terselubung merupakan seseorang yang tidak bekerja secara maksimal dikarenakan alasan tertentu, (2) setengah menganggur merupakan seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam per-

minggu, (3) pengangguran terbuka merupakan seseorang yang betul-betul tidak memiliki pekerjaan (Franita, 2016).

Involuntary unemployment pengangguran tidak disengaja terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu yang mempengaruhi terhadap keuntungan, dengan demikian banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan sehingga harus memberhentikan tenaga kerja (PHK). Voluntary unemployment atau pengangguran disengaja merupakan seseorang yang sebenarnya mampu dan bisa mencari pekerjaan yang layak hanya saja memilih untuk tidak bekerja. Pengangguran friksional atau frictional unemployment (pengangguran gesekan) terjadi dikarenakan tidak adanya keseimbangan antara permintaan tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan (supply and demand of labor). Sehingga calon pekerja tidak bisa menemukan pekerjaan di karenakan beberapa alasan seperti, tempat yang jauh, upah tidak sesuai dengan ekspektasi dan belum ada lapangan pekerjaan (Prof. Dr. Ir. Johannes 1981).

Faktor yang menyebabkan banyaknya orang menganggur di sebabkan beberapa hal diantaranya: (Kasnelly, 2020)

1. Jumlah tenaga kerja tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.
2. Di era industri 4.0 ini justru membuat perusahaan lebih memilih memperkejakan robot atau mesin di bandingkan dengan manusia di karanakan robot atau mesin lebih efesien.
3. Di era industri 4.0 peningkatan kemampuan sumber daya manusia harus di tingkatkan dengan dibekali sertifikasi keahlian.
4. Peningkatan kualitas pendidikan yang masih kurang.
5. Angka kemiskinan masih tinggi.
6. Terjadinya pemberhentian secara masal (PHK).
7. Lokasi kerja yang jauh dari tempat tinggal.
8. Tidak bisa bersaing secara global.
9. Lapangan pekerjaan yang sulit di dapat.
10. Ekpektasi dari calon pekerja yang terlalu tinggi

Tingkat pengangguran yang mempengaruhi grafitasi perekonomian dalam jangka panjang merupakan tingkat pengangguran alamiah, terdapatnya ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja yang membuat mereka kesulitan untuk segera mendapatkan pekerjaan. Adapun menurut Naf'an (2014) untuk mengatasi pengangguran, yaitu:

1. Kebijakan fiskal yaitu dengan menambah pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak;

2. Kebijakan moneter yaitu dengan menurunkan suku bunga, atau menambah penawaran uang, dan menyediakan kredit untuk kegiatan tertentu.;
3. Kegiatan dalam segi penawaran, yaitu dengan cara mengembangkan infrastruktur, memberi subsidi, mendorong lebih banyaknya investasi, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, dan pengurangan pajak perusahaan maupun pajak individu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak persebaran virus pandemi covid 19 terhadap peningkatan jumlah pengangguran serta strategi penanggulangannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari penelitian terdahulu ataupun data yang ada dalam organisasi ataupun instansi. Metode pengumpulan data dalam tulisan ini penulis menggunakan metode kepustakaan (Library research). Metode kepustakaan adalah metode yang menggunakan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, laporan publikasi dan karangan lainnya yang berkaitan dengan data yang akan diteliti. Dengan metode ini penulis tidak perlu melakukan penelitian lapangan cukup dengan mengumpulkan data-data dan dokumen dari referensi yang sesuai dengan penelitian penulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara berpenduduk padat dengan lebih dari 267,7 juta orang penduduk. Itulah sebabnya pandemi ini sangat menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Sudah terkonfirmasi 4.254.443 kasus yang terinfeksi oleh penyakit ini dengan 4.102.700 orang sembuh dan jumlah kematian 143.766 jiwa. Jika pandemi ini terus meningkat maka bencana kesehatan ini berefek menyeluruh pada sektor-sektor lainnya. Banyak sekali perusahaan yang menutup usahanya untuk mencegah penularan pandemi masyarakat ini serta banyak pabrik, toko, dan UMKM lainnya yang terpaksa menutup usaha mereka karna adanya pandemi ini. Hal ini menyebabkan kerugian jutaan dolar dari sektor ekonomi. Salah satu penyebab mengapa virus corona mudah menyebar di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara dengan Sektor pariwisata yang cukup luas. Jika devisa hasil ekspor Kelapa Sawi memiliki kontribusi terbesar di Indonesia maka Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dan memiliki kontribusi devisa terbesar kedua di Indonesia.

Sektor pariwisata memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang pada perekonomian Indonesia. Dampak jangka pendek dapat di rasakan secara langsung, sedangkan dampak jangka Panjang dapat dilihat dengan bertambahnya pendapatan nasional, namun dengan adanya COVID-19 semuanya tidak lagi sama. Sektor pariwisata sekarang sedang mengalami penurunan sehingga daya beli menurun secara drastis karena berkurangnya turis baik lokal maupun mancanegara, yang secara otomatis pendapatan dan devisa yang di hasilkan dari sektor pariwisata semakin menurun. Pemerintah mengeluarkan surat edaran pada tanggal 18 Maret 2020, yang berisikan segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor yang terkait pariwisata dan ekonomi kreatif ditunda sementara waktu demi mengurangi penyebaran corona. Hal ini lah yang mengakibatkan sektor pariwisata menjadi lumpuh sementara, sehingga pengangguran semakin bertambah karena pariwisata merupakan salah satu wadah yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tempat wisata maupun masyarakat dari luar. Bukan hanya sektor pariwisata yang mengalami kelumpuhan sementara, tetapi juga para karyawan dari jenis perusahaan lainnya ikut merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Yang dimana pekerjaan atau kegiatan yang biasanya dilakukan diluar rumah secara langsung sekaran terpaksa harus dilakukan di dalam rumah.

PHK dan Peningkatan Angka Pengangguran

Penyebaran virus corona yang tidak terkontrol membuat pemerintah merespon dengan membatasi mobilitas dan pergerakan masyarakat. Perusahaan dan kantor ditutup, sekolah diliburkan, restoran tidak menerima makan-minum di tempat, dan sebagainya. Segala aktivitas yang membuat orang berkumpul menjadi tabu. Di satu sisi, social distancing ini berhasil menyelamatkan nyawa. Terbukti kasus baru semakin menunjukkan tren penurunan. Namun di sisi lain, social distancing membuat ekonomi menjadi mati suri. Akibatnya, jutaan orang kehilangan pekerjaan, jadi 'korban' Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Gelombang PHK menjadi momok baru di dunia selain virus yang menyerang itu sendiri.

Organisasi Buruh Internasional atau ILO menyerukan agar dunia menggenjot program jejaring pengamanan sosial. Negara-negara juga diminta mengintervensi industri lewat kebijakan untuk menanggulangi besarnya lonjakan potensi pengangguran. Pengangguran di Indonesia yang selama ini menurun dalam lima tahun terakhir akan mengalami kenaikan. Jika skala COVID-19 terus bertambah maka akan meningkatkan jumlah pengangguran yang bertambah itu disebabkan besarnya tekanan yang dialami berbagai sektor usaha. Saat ini kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada lebih dari 2,8

juta pekerja terkena dampak pandemi COVID-19. Hal ini adalah akibat dari terhentinya operasional perusahaan tempat mereka bekerja.

Berdasarkan kompilasi administrasi yang dilakukan oleh Pusdatinaker terhadap pihak-pihak terkait, sekitar 2.265.366 orang yang terdata terdampak covid19. Jumlah tersebut terdiri atas Hasil pendataan Kementerian Ketenagakerjaan RI bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, sejak April 2020 sampai dengan Juli 2020, tercatat sekitar 2.175.928 pekerja yang terdampak. Mereka yang terdampak covid-19 terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

1. Mereka yang dirumahkan dari perusahaan tempatnya bekerja;
2. Mereka yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (ter-PHK); dan
3. Kelompok Pekerja Informal/Bangkrut/Kehilangan Usaha
4. Peserta magang di Jepang yang dipulangkan sebanyak 465 orang;

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 72.983 karyawan telah menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19. Adapun angka ini didapat dari hasil survei baru dilakukan Kemnaker hingga November 2021 lalu. Hasil survei juga menemukan bahwa terdapat 4.156 perusahaan telah melakukan PHK terhadap karyawannya. Ini dilakukan karena kondisi keuangan perusahaan tertekan akibat dampak dari pandemi. Jumlah tersebut bukan lah jumlah yang sedikit, meningkatnya angka pengangguran di Indonesia bisa memberikan dampak yang luar biasa besar pada masa yang akan datang. Tidak mudah bagi suatu negara untuk memulihkan kondisi perekonomiannya dengan cepat ditambah lagi dengan angka pengangguran yang cukup tinggi. Dengan ditutup sementara berbagai sektor industri memaksa para pegawainya untuk menyetujui keputusan yang diberikan. PHK ini juga dilakukan karena kurangnya pembelian dari konsumen dan dibatasinya ekspor ke negara tertentu sehingga akan menghambat ekspor dan mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan perusahaan bisa mengalami kerugian. Ada pun penyebab lain dari PHK nya para karyawan yaitu karena kelangkaan bahan baku untuk diproduksi yang di impor dari negara luar seperti dari negara Thiongkok sehingga akan menghambat kegiatan industri. Perusahaan yang berhenti beroperasi dan peningkatan jumlah angka pengangguran dapat menghambat dan mengurangi produk domestik bruto (PDB) serta menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. PHK ini menjadi alternatif terakhir bagi pengusaha. Sebelum memutuskan untuk melakukan PHK sudah banyak alternatif-alternatif yang dilakukan untuk menghindari PHK seperti mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas seperti manajer dan direktur, mengurangi jam kerja (shift), membatasi dan menghapus jam lembur, mengurangi hari bekerja, dan meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir sementara waktu. Namun

dengan semakin meningkatnya tingkat penyebaran COVID-19 ini memaksa para pengusaha untuk memilih opsi terakhir yakni PHK karna tidak ada pemasukan yang dihasilkan untuk bisa memberika gaji atau tunjangan pada para pegawai.

Peningkatan angka pengangguran yang makin tinggi dapat menyebabkan banyak kemungkinan buruk bila tidak ditangani dengan cara yang tepat. Jika melihat kemungkinan terburuk dengan penanganan yang tidak tepat tingkat penanggungan yang tinggi dapat mengakibatkan angka kemiskinan mencapai dibawah garis batas atau negatif yang menyebabkan semua sektor bisa saja tidak bergerak, dengan kemiskinan yang meningkat dan tidak adanya lapangan pekerjaan bisa timbul masalah lain yg lebih besar yaitu kelaparan. Kelaparan disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pangannya yang diakibatkan oleh kemiskinan yang disebutkan sebelumnya. Kelaparan jika tidak tertangani dengan baik dapat menimbulkan masalah baru yang lebih serius lagi yaitu penjarahan dan kriminalitas. Penjarahan dan kriminalitas terjadi disaat tidak ada cara lain yang dapat seseorang lakukan untuk memenuhi kebutuhannya agar tetap hidup. Hal-hal tersebut tidak dapat kita abaikan, karena ada kemungkinan hal hal tersebut terjadi jika upaya penanganan yang dilakukan sedari awal telah salah langkah. Oleh karna itu peran, upaya dan kebijakan dari pemerintah lah yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia bukan hanya para pekerja yang terdapak oleh pandemi COVID-19 ini saja. Salah satu upaya yang pemerintah lakukan saat ini adalah tidak memberlakukan lockdown dan menggantinya dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Alasan kuat pemerintah tidak memberlakukan lockdown adalah pemerintah melihat budaya dan sikap warga negaranya yang beragam, dan setelah dikaji dan dibahas secara matang pemerintah tidak memberlakukan lockdown ini untuk menghindari efek negatif yang bisa timbul akibat dari lockdown yang diberlakukan. Upaya alternatif yang pemerintah lakukan adalah PSBB dengan upaya ini pemerintah berharap dapat memperlambat laju penyebaran COVID-19 ini dan semua keadaan kembali seperti semula.

Strategi Pengendalian Dampak Covid

Menurut Kemenaker (Kementerian Tenaga Kerja), langkah strategis untuk mengatasi pengangguran di masa pandemi COVID-19, yaitu:

1. Langkah pertama, Kemenaker tetap melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui program BLK (Balai Latihan Kerja) Tanggap COVID-19.
2. Langkah kedua, program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja/buruh terdampak COVID-19 berupa program padat karya dan kewirausahaan.

3. Langkah ketiga, Kemenaker juga telah membuka layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja/buruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.

Program Dan Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tertuang dalam Perpu 1/2020 dan turunan kebijakan fiskalnya diatur dalam (Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2020.) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan yang disusun untuk pemulihan perekonomian nasional yang menjadi bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk percepatan penanganan pandemi covid-19 atau menghadapi situasi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Program PEN memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya. Sedangkan prinsip pelaksanaan program PEN menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2020 yaitu:

1. Asas keadilan sosial
2. Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
3. Mendukung pelaku usaha
4. Menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Tidak menimbulkan moral hazard; dan
6. Adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Realisasi penyaluran sejumlah program PEN terhadap sektor UMKM sampai dengan bulan Desember 2020 sudah mencapai Rp 440,03 triliun. Angka ini setara dengan 63,1 persen dari total pagu yang mencapai Rp 695,2 triliun. Penyerapan anggaran berangsur naik setelah sebelumnya pada bulan November 2020, baru mencapai Rp 366,86 triliun atau 52,8 persen. Realisasi sampai bulan November 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini: Melalui Program PEN salah satu sektor dengan penyerapan angka tertinggi adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM). Lewat Program Bantuan Presiden (BanPres) Produktif Usaha Mikro realisasi mencapai sebesar Rp 26,48 triliun dari pagu anggaran sebesar 28,82 triliun, atau 91,94 persen. Bantuan tersebut berupa dana hibah sebesar Rp 2,4 juta bagi setiap pelaku usaha mikro kecil memberikan kontribusi besar penyerapan secara keseluruhan pada enam program di klaster UMKM, yaitu sebanyak Rp 101,07 Triliun, atau 87,26% dari pagu anggaran Rp 115,83

Triliun Sedangkan Program Banpres Produktif Usaha Mikro sudah disalurkan ke 11 juta pelaku usaha dalam 27 tahap. Target sasaran bantuan ini mencapai 12 juta pelaku usaha sampai tahun 2020 berakhir.

Bedasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, tiga daerah tercatat sebagai penerima terbanyak Banpres ini, yakni Jawa Barat sebanyak 1.223.010 pelaku usaha mikro, Jawa Timur sebanyak 1.534.287 usaha mikro, dan Jawa Tengah sebanyak 1.530.021 usaha mikro. Melihat manfaat dari program ini cukup besar, pemerintah melalui Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, akan terus mendorong realisasi penyerapan anggaran program ini. pemerintah berencana meneruskan program ini dan dapat diperluas cakupannya pada tahun berikutnya, sehingga mampu mempercepat pemulihan perekonomian nasional.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa wabah covid-19 berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia khususnya tingkat pengangguran. Oleh karna itu peran, upaya dan kebijakan dari pemerintah lah yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Salah satu upaya yang pemerintah lakukan saat ini adalah dengan memberikan berbagai macam bantuan sosial dan pengembangan diri bagi para pekerja dan UMKM untuk peningkatan skill dan keterampilan. Selain itu pemerintah juga mengupayakan pengendalian pengangguran lewat program pemulihan ekonomi nasional dengan harapan stabilitas perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha. Jakarta: BPS RI.
- Boyce, Delaney, & Wood. (2018). The Great Recession and subjective well-being.
- Eddyono, Suzanna, et. Al. (2020). Pandemi dan Yang Tersingkir: Menakar Urgensi Kebijakan Inklusif Penanganan Covid-19. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: UGM Press.
- Franita, Riska. (2016). "Analisa pengangguran di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 1 (3): 88-93.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19, *Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2): 83-92.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1): 146-153
- Indayani, Siti, dan Budi Hartono. (2020). "Analisis Pengangguran Dan

- Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19." *Jurnal Perspektif* 18 (2): 201-8.
- Kasnelly, Fahri Abd Jalil Sri. (2020). "Meningkatnya Angka Pengangguran Ditengah Pandemi (Covid-19)." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (1):45-60.
- Naf'an. (2014). *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmi.
- Prof. Dr. Ir. Johannes. (1981). *Kamus Istilah Ilmu dan Teknologi*. Cetakan pertama. Jakarta: PT Indira.
- Uly, Yohana Artha, and Bambang P. Jatmiko. (2020). "Ekonom: Indonesia Resesi, Masyarakat Diminta Tak Panik." *Kompas.Com*. Retrieved (<https://money.kompas.com/read/2020/11/06/130800826/ekonom--indonesiaresesi-masyarakat-diminta-tak-panik>).